

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Budaya Politik merupakan suatu hal yang meliputi sikap-sikap dari warga suatu Negara terhadap kehidupan pemerintahan dan politiknya. Dalam konteks sebuah Negara budaya politik itu sering kali diwarisi dan dibentuk oleh Sosialisasi politik¹ di Negara tersebut. Terkadang hal ini terjadi pada waktu adanya perubahan besar ataupun terjadi sebuah peristiwa yang besar pula , misalnya terbentuknya sebuah Negara baru. Sosialisasi politik dapat menciptakan sebuah budaya politik yang baru sama sekali. Hal inilah yang dialami oleh Pakistan ketika pertama kali terbentuk sebagai sebuah Negara dengan ideology Islam.

Negara ini sempat menjadi rujukan dalam hal gagasan Negara Islam bagi partai-partai Islam di Negara mayoritas muslim, karena banyak Negara yang beranggapan bahwa dengan sebuah konsep Negara Islam maka akan dipercaya dapat memperbaiki tatanan kehidupan bernegara suatu Negara yang semakin hari semakin terdesak oleh arus modernisasi sekuler dan kekuatan-kekuatan ekonomi liberal utama aktor dunia

Secara ideal ajaran dari pendapat ini sebenarnya tidaklah salah. Tetapi, ada satu hal fundamental yang terkadang sering dilupakan, yakni kondisi sosio-kultural-intelektual umat Islam yang sedikit terkebelakang sama sekali dirasa

¹ Istilah Sosialisasi Politik dapat berarti bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam system politiknya; menunjuk pada proses –proses pembentukan sikap-sikap politik dan polah tingkah laku. Lihat Mohtar Mas'oed, Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: GadjahMada Press .2006. hal.34

belum siap untuk mendukung gagasan mewah berupa sebuah negara modern. Umat Islam yang selama berabad-abad terkurung dalam pasungan budaya politik dinastik-otoritarian-kekhilafahan menjumpai kesulitan yang luar biasa untuk menciptakan sebuah negara egalitarian di era pascakolonial.

Islam seolah-olah tidak berdaya menjadi kekuatan mediasi dalam meredam konflik sesama Muslim, karena memang belum pernah dijalankan secara serius oleh pemimpin-pemimpin di dunia Islam.

Pakistan yang diidolakan itu ternyata kemudian juga gagal memenuhi harapan untuk menjadi sebuah Negara yang demokrasi berasaskan dengan nilai-nilai Islam. konflik suku yang beragam dan sengketa politik yang sering berkuah darah diantara para elite politiknya serta kudeta militer telah terjadi berkali-kali di Negara ini.

Naiknya Asif Ali Zardari sebagai Presiden Pakistan yang baru menggantikan posisi Pervez Musharaff lewat kemenangan mutlak suara di pemilu 2008, menjadi sebuah udara segar bagi rakyat Pakistan yang sudah jengah terhadap konflik yang masih terus berlangsung di negaranya, hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang *Pengaruh Budaya Politik dan Legitimasi Elite Pakistan Terhadap Kemenangan Asif Ali Zardari dalam Pemilihan Presiden Pakistan 2008*.

B. Tujuan Penelitian

Secara garis besar ada beberapa tujuan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku politik di Pakistan sehingga Asif Ali Zardari terpilih dalam pemilihan presiden.
2. Mengetahui budaya politik seperti apa yang berpengaruh bagi Asif Ali Zardari sehingga memenangkan pemilihan presiden.
3. Mempelajari memperoleh pemahaman yang jelas mengenai dinamika budaya politik di Negara Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Muslim,
4. Memberikan sumbangan akademis bagi almamater

C. Latar Belakang Permasalahan

Pakistan didirikan oleh Muhammad Ali Jinnah² pada tanggal 14 Agustus 1947 yang mendapatkan inspirasi dari pemikiran Muhammad Iqbal. Pemikiran dari orang yang bercita-cita untuk mendirikan Negara Islam terpisah dari India yang mayoritas beragama Hindu. Menurut Iqbal, Hindu dan Islam tidak bisa menjadi bangsa yang satu karena memiliki perbedaan yang sangat prinsipil semenjak jatuhnya Dinasti Mughal, umat Islam India sadar bahwa kedudukannya akan terancam karena status mereka sebagai kelompok minoritas.

² **Muhammad Ali Jinnah** lahir pada 25 Desember 1876 dan meninggal dunia pada 11 September 1948. Beliau merupakan ahli politik Islam dan juga pendiri negara Pakistan serta pemimpin Liga Seluruh India. Atas perjuangan beliau, Pakistan telah berpisah daripada India dan beliau menjadi Gubernur-Jenderal pertama Pakistan. Hari kelahiran dan kematiannya merupakan hari Libur Nasional di Pakistan. Lihat www.wikipedia.com/Muhammad_Ali_Jinnah.htm

Awal berdirinya Pakistan sudah menghadapi banyak permasalahan dalam perjalanannya sebagai sebuah Negara, walaupun jika dilihat dari penduduknya yang homogen jika ditinjau dari agama yang mayoritas muslim, kenyataannya mereka adalah gabungan rakyat dari 32 macam bahasa dan sentimen daerah (primordial) yang sangat kuat. Ditambah lagi dengan keberadaan kelompok fundamentalis dan sekuler, serta konflik sipil dengan militer yang terus mengiringi dinamika politik di negeri ini.

Berbicara mengenai budaya politik, di Pakistan terdapat Fenomena perilaku politik yang sangat menarik. Pemegang kekuasaan di Negara ini tidak hanya dihiasi oleh peran militer, tetapi juga peran sipil dalam menghadirkan proses budaya politik di Pakistan. Sipil dan dan militer merupakan dua kutub yang secara silih berganti memegang tampuk pemerintahan di Pakistan. Baik melalui pemilihan umum maupun lewat kudeta militer.

Sebagai sebuah Negara Islam gejala politik di negeri ini hampir tidak pernah reda. Kekerasan demi kekerasan selalu mengoyak Pakistan. Banyak yang menilai “budaya kalashnikop”³ masih tertanam kuat di negeri ini. Politik masih bersanding dengan bedil. Hampir setiap krisis politik selalu berujung pertumpahan darah. Tercatat beberapa kali terjadi perlawanan baik yang ditimbulkan oleh kaum militan ataupun oleh kelompok-kelompok tertentu.

Ketika dibentuk sebagai sebuah Negara Islam , pada awalnya Pakistan diharapkan menjadi faktor penentu dalam membangun pribadi dan masyarakat muslim India saat itu, sesuatu yang tidak akan terwujud jika masih berada dibawah dominasi asing maupun Hindu. Pencarian masa depan yang cerah bagi

³ Kalashnikop adalah nama sejenis senjata buatan Rusia, dinamai budaya kalashnikop karena budaya politik Pakistan yang selalu diwarnai oleh gejala yang terkadang sering menggunakan senjata untuk melakukan penggulingan terhadap sebuah rezim yang mempertahankan status quo

umat Islam merupakan usaha untuk menemukan kepribadian, ideologi yang mengesahkan suatu tatanan sosial baru berdasarkan cita-cita dan nilai-nilai Islam.⁴

Hal ini bisa terbaca dengan jelas janji masyarakat Pakistan mengenai tujuan dari Pakistan pada awalnya di beberapa kalimat akhir di Pembukaan konstitusi Pakistan yang berbunyi :

“ now, therefore, we, the people of Pakistan; Conscious of our responsibility before Almighty Allah and men; Cognizant of the sacrifices made the people in the cause of Pakistan;
Faithfull to declaration made of the founder of Pakistan, Quaid-E-Azam Mohammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic based of Islamic Prinsipil of social justice;
Dedicated of preservation of democracy by the unremitting struggle of the people against oppression and tyrani;
Inspire by the resolve to our national and political unity and solidarity by creating egalitarian society through a new order.....”⁵

Negeri yang didirikan oleh *Quaid-E-Azam* Muhammad Ali Jinnah ini mempunyai cita-cita yang luhur, yaitu ingin mewujudkan Negara Pakistan yang demokratis yang berdasarkan dengan prinsip ajaran Islam dan keadilan sosial, menjalankan kesatuan politik, dan menciptakan masyarakat yang saling bertenggang-rasa, tetapi cita-cita dan janji yang termaktub didalam pembukaan konstitusi tersebut masih lemah dalam penerapannya di masyarakat dan terutama bagi elite-elite di Pakistan.

Dalam kurun waktu 50 tahun di Pakistan telah terjadi tiga kali kudeta militer , dan terakhir kudeta militer terjadi tahun 1999. Sehingga kita bisa melihat bagaimana tirani militer dapat mudah berkembang bebas di Negara ini. Meski pernah dipimpin oleh pemerintah sipil, namun negeri ini tetap tak bisa lepas dari bayang-bayang militer.

⁴ John L Esposito, *Dinamika Kebangkitan Umat Islam* (Jakarta: Rajawali Pers,1987), hlm. 275-276.

⁵ NN. Constitution of Pakistan. Pdf. hal. 1-2 diunduh dari www.na.gov.pk/publications/constitution.pdf tgl. 22 Oktober 2008

Tercatat terdapat empat orang pemimpin Pakistan dari kalangan militer yang pernah memerintah Pakistan, Muhammad Ayub Khan, Yahya Khan, Muhammad Zia-ul-Haq, dan terakhir Pervez Musharaff dan hampir semuanya memimpin setelah melakukan kudeta terlebih dahulu. lebih dari 30 tahun Pakistan dibawah kepemimpinan rezim militer yang terkadang cenderung mengarah kepada kepemimpinan diktator yang menghalalkan usaha-usaha represif untuk tetap mempertahankan kekuasaan.⁶

Terkadang Kudeta militer yang berulang kali mengoyak Pakistan, sama sekali bukan atas nama Islam, melainkan motivasi sekulerisme yang dipaksakan oleh para Jenderal sekuler, dengan dukungan kekuatan asing untuk menelikung negara Islam Pakistan yang sangat ditakuti Barat. Musharraf yang telah berkuasa selama lebih dari delapan tahun, sebagai seorang perwira militer ia juga menyaksikan sendiri perkembangan konflik antara Benazir Butho dengan Nawaz Syarif. Akan tetapi ada pertentangan yang sangat tajam yang bergolak di dalamnya, yakni antara aspirasi politik sekuler dan Islam militan.

Kompetisi politik yang sengit selama dasawarsa terakhir ini antara pemerintahan Musharraf dan para seterunya yaitu Benazir Butho dan Nawaz Syarif akhirnya dihiasi oleh sebuah tragedi, ketika Benazir Butho tewas dalam peristiwa bom bunuh diri saat sedang berkampanye pada Desember 2007. Tewasnya seorang mantan Perdana Menteri wanita pertama Pakistan itu menimbulkan sentimen negatif terhadap pemerintahan yang berkuasa. Banyak pihak yang beranggapan kelompok muslim radikal dibawah jaringan Al-Qaida yang bertanggung jawab terhadap peristiwa peledakan bom itu. Tetapi tidak sedikit pula

⁶ <http://www.en.wikipedia.org/wiki/pakistan>

yang menyalahkan Pemerintahan terutama Musharaff yang tidak mampu menciptakan keamanan bagi rakyatnya.

Pasca tewasnya Butho, situasi politik di Pakistan semakin tidak menentu. Posisi Musharaff selaku presiden semakin terpojok, banyak usaha yang telah dilakukan Musharaff agar dapat mempertahankan kekuasaannya, terakhir adalah dengan membekukan undang-undang dan menetapkan undang-undang darurat. Tetapi hal ini tidak berhasil dalam mengamankan stabilitas politik di Pakistan, karena banyak yang beranggapan bahwa dengan melakukan penetapan undang-undang darurat sama saja dengan Musharaff sedang melakukan sebuah demonstrasi kekuatan dari elite/penguasa. Inilah yang sering disebut-sebut sebagai sebuah kediktatoran dengan bungkus demokrasi dan kegagalan sekulerisme dalam menyejahterakan bangsa.

Pasca tewasnya Butho terjadi perubahan peta dan perilaku politik yang cukup signifikan di Pakistan, di pemerintahan dan elite terjadi sebuah persaingan yang sengit untuk menghadapi Pemilu Parlemen pada saat itu. Persaingan itu mengerucut antara dua partai Besar yaitu PPP dan PML-N, sedangkan PML-Q sepertinya tidak akan masuk hitungan jika melihat *track record* Musharaff yang gagal dalam memimpin Pakistan selama 9 tahun.

Di etnik Pakistan sendiri terjadi pergeseran orientasi budaya politik, pasca Butho rakyat kembali terkotak-kotak dalam selubung primordialisme yang semakin menguat, masa dimana politik parokialisme di masyarakat semakin menguat yang bisa dilihat dari semakin meningkatnya dukungan terhadap PPP di propinsi Sindh dan beberapa daerah yang memiliki kedekatan emosional dengan dinasti Butho. Begitu juga dengan propinsi lain politik kelokalan semakin

menguat, dengan beraneka ragamnya etnik yang ada di Pakistan sangat mungkin parokialisme di masyarakat dapat dimanfaatkan oleh elite-elite Pakistan.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh kubu Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang kini dipimpin oleh Asif Ali Zardari suami mendiang Benazir Butho untuk dapat meraih respon positif dari rakyat Pakistan, langkah awal dalam merespon parokialisme yang berkembang di masyarakat adalah dengan kemenangan PPP pada pemilu parlemen nasional Februari 2008.

Kemenangan PPP pada pemilu Februari itu, membuat PPP berhak menyusun kabinet pemerintahan, tetapi karena kursi parlemen yang diraih tidak mayoritas PPP akhirnya membuat pemerintahan koalisi dengan PML-N dibawah pimpinan Nawaz Syarif. Koalisi yang sebenarnya tidak terlalu kuat karena lebih bersifat *Shotgun Mariage*, bukan didasarkan pada koalisi *strategic partnership*. Koalisi yang dibangun oleh dua partai besar di Pakistan ini hanya bertujuan untuk dapat menggusur Musharaff dari posisi presiden.

Kemenangan partai oposisi yaitu PPP dan PML-N membuat pemerintahan Musharaff pun semakin terpojok atas kekalahan dalam pemilu bulan Februari tersebut, di satu sisi kondisi ekonomi di Pakistan semakin anjlok dan semakin maraknya aksi militansi di Negara-negara kawasan Asia Selatan menyebabkan popularitas bekas pemimpin militer dan sekutu kuat AS ini sepertinya akan segera berakhir.

Akhirnya seiring semakin terpuruknya kondisi Pakistan, Musarraff pun dihadapkan pada dua kemungkinan yang harus dilaksanakan yaitu mengundurkan diri atau mendapatkan pemakzulan dari parlemen. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2008 Musharaff secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya

sebagai Presiden Pakistan yang diraihnya melalui kudeta tak berdarah pada tahun 1999.

Untuk mengisi kekosongan kepala Negara tersebut maka diadakan Pemilihan Presiden oleh parlemen. Seperti yang telah diramalkan sebelumnya koalisi antara Pakistan People Party (PPP) dan Pakistan Muslim League (PML-N) pecah.⁷ Masing-masing partai tersebut mencalonkan masing-masing kandidat presidennya untuk dapat dipilih Presiden.

Kompetisi politik yang dilakukan oleh elite di Pakistan pasca Musharaff semakin marak dengan bermunculan kembali figur-figur lama yang pernah memiliki pengaruh di Pakistan. Seperti kebanyakan Negara-negara dunia Islam yang masih menganut paham Patrinalistik, Lanskap politik Pakistan pun mirip Indonesia. Diwarnai oleh krisis pemimpin muda dari kalangan sipil. Negara ini nyaris hanya bergantung pada figur-figur gaek, atau figur lama. ketika Benazir Butho masih hidup kompetisi elite praktis hanya antara dia dan Nawaz Syarif. Setelah Butho tewas, muncullah figur baru (tapi lama) untuk mengisi kekosongan pemerintahan seperti Asif Ali Zardari suami mendiang Butho, Saeed us Zaman Siddiqui seorang pensiunan ketua Mahkamah Agung yang diusung oleh partai PML-N pimpinan Nawaz Syarif, dan Mushahid Hussein seorang pendukung utama Pervez Musharaff.

PPP pasca butho tewas tidak memiliki pemimpin lagi, Bilawal Butho yang ditunjuk menjadi ketua PPP masih terlalu hijau, akhirnya Asif Ali Zardari yang muncul, ia memutuskan untuk ikut pemilu presiden Pakistan dan akhirnya ia menang pemilu dan terpilih menjadi presiden Pakistan. Jika dilihat dari

⁷ [http:// www.erasuslim.com](http://www.erasuslim.com)

latarbelakangnya Zardari memang bukan intelektual yang memiliki pandangan geopolitik dan ekonomi sama seperti Bhutto. Ia juga tidak punya kharisma seperti Bhutto. Namun, pendukungnya yakin ia terbukti tahan banting dan seorang politikus yang lihai. Parokialisme di Sindh terhadap keluarga Butho sedikit banyak telah mempengaruhi keputusan Zardari. Kematian Bhutto membulatkan tekad Zardari bergerak cepat. Zardari dapat memanfaatkan statusnya sebagai anggota dinasti Butho dalam memobilisasi masyarakat parokial di negaranya. Tidak hanya menjadi pemimpin di lingkup PPP, Zardari kini menjadi penentu arah Pakistan di masa depan.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba untuk meneliti permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : *Bagaimana budaya politik mempengaruhi kemenangan Asif Ali Zardari dalam pemilihan presiden Pakistan 2008 ?*

E. Kerangka Dasar Berfikir

Dalam upaya menganalisa sebuah fenomena budaya politik yang terjadi disebuah Negara diperlukan sebuah teori sebagai sebuah kerangka dalam berfikir, dimana teori merupakan bentuk penjelasan yang paling umum yang memberitahu

mengapa sesuatu itu terjadi dan kapan sesuatu itu diduga akan terjadi. Teori juga dapat dijadikan sebagai sarana eksplanasi dan juga menjadi dasar bagi prediksi.⁸

Dalam hal ini penulis memiliki beberapa konsep dalam kerangka dasar analisa yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

Konsep Budaya Politik

Menurut Gabriel Almond budaya politik adalah pola sikap dan orientasi individu terhadap politik diantara anggota sistem politik.⁹ Orientasi individu itu memiliki sejumlah komponen yakni :¹⁰

1. Orientasi Kognitif : meliputi pengetahuan, keyakinan mengenai system politik
2. Orientasi Afektif : meliputi perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang sistem politik
3. Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.

Orientasi individu terhadap obyek politik dapat dipandang dari tiga hal itu. Oleh karena itu seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya dan masalah-masalah dari

⁸ Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta:LP3ES,1990 hal 217

⁹ System bisa diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi terhadap suatu lingkungan, yang mempengaruhi maupun dipengaruhi, begitu juga dengan definisi sederhana dari system politik yaitu suatu yang menunjukkan interaksi dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi satu sama lain. lihat. Mohtar Mas' oed, Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: GadjahMada Press .2006.

¹⁰ Gabriel Almond and Sidney Verba ,*The Civic Culture*, Boston and Toronto: Little Brown and Company. 1965.hal.15

kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif. Namun ia mungkin memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Mungkin keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Mungkin ia tak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem. Itulah yang disebut dimensi afektif. Akhirnya seseorang mungkin memiliki penilaian moral terhadap sistem. Barangkali norma-norma demokrasinya mendorong dia menilai sistem sebagai tidak cukup responsif terhadap tuntutan politik atas norma-norma etikanya mendorong dia mengecam tingkat korupsi dan nepotisme. Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasi dalam berbagai cara.

Setiap Negara yang sedang menuju kearah pematangan proses demokrasi hampir setiap penduduknya memiliki ketiga orientasi seperti ini. Tidak terkecuali di Pakistan, walaupun pondasi demokrasi yang belum begitu kuat di Negara ini, tetapi akibat dari kemajuan informasi yang menyebabkan masyarakatnya untuk dapat memiliki ketiga aspek tersebut. Secara garis besar rakyat Pakistan mengetahui siapa pemimpinnya dan mengetahui setiap kebijakan yang yang dicetuskan oleh sang pemegang kekuasaan pemerintahan, dari pengetahuan kognitif tersebut maka tumbuh kesadaran untuk melakukan penolakan terhadap system apabila mereka merasakan sebuah ketidak cocokan yang akhirnya akan menimbulkan orientasi evaluasi terhadap pemerintahan, tetapi rezim militer yang telah berulang kali memerintah di Pakistan membuat ketiga orientasi politik masyarakat ini tidak berjalan dengan semestinya.

Kasus mundurnya Pervez Musharraf dari jabatan sebagai presiden Pakistan karena dihadapkan pada mosi tidak percaya dari masyarakat dan

parlemen bisa dikatakan sebagai sebuah pengecualian dalam melihat orientasi politik masyarakat. Pada saat itu masyarakat yang mulai jengah terhadap pemerintahan Musharaff menggunakan orientasi evaluasi yang muncul setelah dikombinasikan dengan orientasi kognitif dan afektif karena pemerintahan Musharraf dianggap tidak mampu untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi di Negara tersebut ditambah lagi dengan sikap politik Pakistan yang terlalu pro-Amerika.

Tipe-tipe Budaya Politik

Dari definisi mengenai budaya politik tersebut Almond dan Verba mengkategorikan orientasi budaya politik seseorang dalam : ¹¹

- 1) Politik Parokial : Budaya politik dimana individu / masyarakat yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik, situasi dimana para elite diberlakukan dengan sedemikian rupa . Pada budaya politik ini tidak adanya ide yang berkembang, jika semua itu telah berkembang maka akan muncul budaya yang patrimonial dan paternalistik. Budaya Islam cenderung mengarah kepada budaya parokial ini.

- 2) Politik Subjek : yaitu budaya dimana individu / masyarakat yang secara pasif patuh pada system (elite) dan keputusan (perundang-undangan) tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara pada pemilihan.

¹¹ Mohtar Mas' oed, Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: GadjahMada Press .2006. hal.41-42

- 3) Politik Partisipan : yaitu budaya dimana individu / masyarakat yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara (voting), dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik.

Hampir di setiap aspek kehidupan di Pakistan meliputi sosial, ekonomi, politik dan keamanan mengalami sebuah kemunduran beberapa dekade terakhir. Gejolak politik yang tidak pernah berhenti dinegara ini yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih bersifat authoritarian sehingga mengakibatkan kondisi sosio-kultural masyarakatnya yang cenderung terkotak kotak. Latar belakang Pakistan yang sangat kental dari warisan sejarah colonial yang mempunyai kebijakan membagi strata etnik dalam masyarakat, ternyata masih bisa dirasakan sampai sekarang. Ada beberapa etnik besar di Pakistan yang selalu mewarnai budaya politik di Negara ini diantaranya, etnik Pujab, Sindh, Afghan (Psthun) Balochistan. Secara garis besar pengelompokkan akan tampak jelas jika dibagi menjadi dua kategori besar yaitu masyarakat urban dan masyarakat rural dimana masyarakat yang tinggal didaerah pedesaan (rural) hidup jauh dibawah pengaruh norma-norma lokal, nilai dan tekanan sosial dan kepercayaan yang pasif untuk memberikan respek yang besar terhadap pemerintah. Mereka ini tidak memiliki kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Disini kita dapat menilai bahwa unsur parokialnya sangat kuat, didaerah tertentu seperti Sindh misalnya Parokialisme masyarakat ditandai dengan begitu loyalnya mereka terhadap keluarga Butho

sehingga memposisikan keluarga tersebut sedemikian rupa. Ini yang membedakan status mereka dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan, di perkotaan dengan tingkat literasi dan pendidikan yang cukup tinggi kemungkinan besar masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat ikut dalam proses politik.

F. Hipotesis

Dari teori diatas penulis dapat memberikan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang dikemukakan dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat diuji kebenarannya. Budaya politik di Pakistan memiliki pengaruh terhadap kemenangan Asif Ali Zardari dalam pemilihan presiden pakistan melalui :

1. Pemanfaatan politik Parokial di Sindh memberikan peran yang strategis dalam meraih kemenangan dalam pemilu presiden.
2. Pengelolaan budaya politik parokial masyarakat Punjab menjadi budaya politik subjektif oleh Asif Ali Zardari, membuat Zardari dapat memecah suara pemilih di etnik Punjab untuk memenangkan pemilu presiden 2008.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data berupa studi literatur yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan pertimbangan pengumpulan data dalam

penelitian ini secara kualitatif didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi buku, jurnal yang relevan, surat kabar, dan internet.

H. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini menjadi fokus, maka penulis akan membatasi penelitian ini secara waktu dan objek penelitian. Ditinjau dari waktu data-data akan diambil mulai akhir tahun 2007 ketika Benazir Butho tewas tertembak ketika sedang berkampanye untuk menjadi Perdana Menteri Pakistan hingga Pakistan dibawah kepemimpinan Asif Ali Zardari setelah terpilih dalam pemilihan presiden tahun 2008. Jadi pada kurun waktu 2007-2008 tersebut penulis berusaha untuk mengidentifikasi budaya politik yang terjadi di Pakistan. Yang kedua jangkauan objek penelitian yaitu dengan memfokuskan mengenai budaya politik parokial di dua etnik besar Pakistan yaitu Punjab dan Sindh. Dan untuk area studi akan dibatasi pada wilayah perilaku politik yang mempengaruhi legitimasi para elite dalam usaha pemenangan pemilihan presiden di Pakistan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana antara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kebulatan yang utuh.

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari : Alasan pemilihan judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar

Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab II. Berisikan tentang Dinamika budaya politik dalam system politik Pakistan, sejarah berdirinya Pakistan, system pemerintahan Pakistan, struktur social Pakistan, Parokialisme Politik di Pakistan,system pemilu Pakistan,dan Partai Politik di Pakistan.

Bab III. Pembahasan mengenai Kompetisi elite Pakistan pasca mundurnya Musharaff berisi tentang mundurnya Musharaff sebagai presiden. Profil elite Pakistan, rivalitas elite Pakistan, Pemilihan presiden Pakistan 2008

Bab IV. Pembahasan mengenai pengaruh budaya politik Pakistan terhadap kemenangan Asif Ali Zardari dalam pemilu presiden 2008. Parokialisme di etnik Sindh, Pengelolaan Politik Subjek di etnik Punjab.

Bab V. Penutup / Kesimpulan, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.